



Laporan Komisaris Utama

Mari Elka Pangestu

Komisaris Utama

“

Penggabungan usaha menjadi awal dari suatu perubahan besar dalam perjalanan usaha Bank. Proses integrasi bukan hanya terkait perubahan di bidang usaha dan menuju universal bank, namun juga penyesuaian untuk menggabungkan dua kultur yang berbeda.

”

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan berkenaan dengan tugas utama Dewan Komisaris sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Tugas dimaksud adalah terkait dengan pelaksanaan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi.

Berkenaan dengan tugas tersebut, pada tahun buku 2019, Dewan Komisaris memberikan perhatian penuh pada aksi korporasi Bank BTPN yang sangat penting, yaitu penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Penggabungan usaha ini, selanjutnya melahirkan nama baru, yaitu PT Bank BTPN Tbk.

Peristiwa tersebut merupakan tonggak penting bagi Bank BTPN, yaitu penggabungan dua bank dengan konsentrasi usaha yang berbeda, ritel, UKM dan korporasi. Selain itu, dengan penggabungan, BTPN menjadi anak perusahaan dari kelompok usaha global ternama di Asia, yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Penggabungan usaha menjadi awal dari suatu perubahan besar dalam perjalanan usaha Bank. Proses integrasi bukan hanya terkait perubahan di bidang usaha dan menuju universal bank, namun juga penyesuaian untuk menggabungkan dua kultur yang berbeda. Penggabungan ini juga memulai babak baru sinergi usaha dalam Grup SMBC di Indonesia.

Kondisi Makro

Di tengah peristiwa penting yang sedang dialami oleh Bank BTPN, yaitu penggabungan usaha dengan SMBCI, manajemen dihadapkan dengan kondisi politik nasional yang cukup berwarna, selain juga dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang cukup menantang.

Dari pandangan global, kinerja ekonomi nasional mengalami perlambatan karena mengalami berbagai macam tekanan, misalnya dengan lesunya perdagangan internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang 2019, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar USD3,2 miliar. Tekanan defisit tersebut, terutama disebabkan oleh sektor minyak dan gas bumi (migas) dengan defisit mencapai USD9,3 miliar.

Perlambatan pada kinerja perekonomian nasional juga sebagai akibat kurang bergairahnya kegiatan dunia usaha. Tingkat produksi mengalami perlambatan, sehingga kemampuan untuk melakukan ekspansi bisnis mengalami keterbatasan. Bagi bisnis perbankan, dunia usaha merupakan mitra yang sangat penting. Ketika dunia usaha sedang mengalami perlambatan, maka pinjaman juga akan mengalami tantangan besar.

Bank Indonesia merespon perkembangan dunia usaha di 2019 melalui kebijakan relaksasi suku bunga acuan. Dalam kurun waktu enam bulan sepanjang 2019, Bank Indonesia telah melakukan empat kali penurunan suku bunga, yaitu dari 6,00% pada bulan Juni menjadi 5,00% pada Desember 2019. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan gairah dunia usaha makin meningkat.

Menyikapi situasi ini, manajemen menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kinerja Direksi Selama Tahun Buku 2019

Fokus Bank di tahun 2019 adalah menyelesaikan penggabungan antara Bank BTPN dengan SMBCI, integrasi dan stabilisasi operasi di samping juga melanjutkan pengembangan usaha Bank paska merger.

Dewan Komisaris menilai bahwa proses penggabungan usaha yang dijalankan Direksi secara umum telah berjalan dengan baik. Penggabungan usaha telah diselesaikan dengan baik dan secara tepat waktu di tanggal 1 Februari 2019.

Bank telah pula menyiapkan Rencana Bisnis bagi bank hasil penggabungan, yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi. Dewan Komisaris juga menilai kinerja Direksi dari kelancaran konsolidasi kedua entitas tersebut, sehingga memungkinkan Direksi dapat lebih fokus pada upaya peningkatan profitabilitas. Bank BTPN setelah penggabungan menjadi universal bank, yang melayani segmen ritel hingga

korporasi, dan dengan dukungan produk dan layanan yang lengkap atau *end to end*.

Sejak penggabungan, Bank BTPN memiliki bisnis inti yang terdiversifikasi, dari yang semula berfokus pada segmen pensiun, ritel, dan UKM sampai pembiayaan komersial hingga korporasi, dengan dukungan *platform-platform* digital. Bank BTPN kini memiliki kekuatan baru, yaitu sebagai bank yang merupakan anggota dari kelompok usaha dengan jaringan global dan dengan berbagai bentuk bidang usaha keuangan yang memberikan kapabilitas kepada Bank BTPN untuk menawarkan beragam inovasi produk dan jasa, melakukan *cross selling* termasuk *supply chain* dan memberikan dukungan terhadap segmen usaha syariah melalui anak perusahaan. Semua ini memberi kontribusi positif dan mendukung kinerja usaha Bank BTPN secara berkesinambungan.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan kinerja di 2019, dimana Bank BTPN secara fundamental memiliki rasio kecukupan modal yang menguat di posisi 24,24%, di atas ketentuan regulator.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi kinerja manajemen terhadap kualitas kredit. Tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bruto menjadi 0,8% dari 1,2% tahun sebelumnya.

Bank berhasil mencatat laba bersih setelah pajak (*net profit after tax/ NPAT*) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,6 triliun untuk tahun 2019, dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,8 triliun, atau mengalami kenaikan 32%.

Penerapan Kebijakan dan Prosedur

Bank BTPN setelah penggabungan usaha telah menetapkan sebuah visi baru yaitu, menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan digital.

Dewan Komisaris percaya bahwa perubahan visi tersebut menjadi pijakan penting bagi Bank dalam menentukan arah perkembangannya ke depan.

Penerapan visi ini didukung dengan infrastruktur berupa kebijakan dan prosedur yang berlaku di setiap tingkat organisasi. Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah berhasil melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur yang berasal dari bank peserta penggabungan, dan mengeluarkan kebijakan dan prosedur yang dibuat dari kombinasi ketentuan yang berlaku pada kedua bank dan telah diperbaharui.

Penerapan kebijakan dan prosedur menjadi tantangan sendiri bagi Bank BTPN yang saat ini fokus kepada pertumbuhan usaha dengan sepenuhnya memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dari regulator maupun secara kebijakan internal.

Penerapan GCG

Dewan Komisaris memandang bahwa komitmen kuat atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan fundamental yang kokoh dalam menjaga kesinambungan usaha Bank, mengingat perbankan merupakan bisnis di sektor jasa

keuangan yang menjadikan kepercayaan para pemangku kepentingan sebagai fundamental dalam bisnis.

Dewan Komisaris sebagai bagian dari struktur GCG yang memegang peran penting dalam penerapan GCG, memandang bahwa Bank BTPN telah melakukan kemampuan yang terbaik dalam menerapkan pelaksanaan GCG. Hal ini termasuk pelaksanaan fungsi oleh Direksi, Dewan Komisaris, beserta komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan rapat-rapat dari organ-organ tersebut telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, panduan dan tata tertib kerja (*charter*). Kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dianggap telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dan Komite-komite telah memberikan rekomendasi yang relevan dan membangun kepada Dewan Komisaris di sepanjang tahun.

Penunjukan Bank BTPN sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan SMBC, menggantikan SMBCI merupakan langkah strategis bagi Bank BTPN dalam mensinergikan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk dalam hal audit, keuangan, risiko, kepatuhan dan tata kelola.

Selama 2019, telah dilakukan pendalaman terhadap materi kebijakan mengenai pemberian hadiah dan hiburan, *anti fraud* serta prosedur mengenai informasi orang dalam dan transaksi orang dalam. Selain itu dikenalkan kebijakan baru terkait alur komunikasi antara SMBC dengan Bank serta kedatangan tamu asing serta pemenuhan pelaporan karena SOX yang bertujuan untuk kontrol atas independensi dan transparansi serta akuntabilitas manajemen.

Menjadi bank yang merupakan anggota suatu kekuatan ekonomi global Asia, menyebabkan Bank wajib memenuhi standar kepatuhan yang lebih tinggi dan berlaku lintas negara. Standar kepatuhan hal ini akan memiliki pengaruh bagi perkembangan Bank BTPN menjadi bank yang bersih dan terpercaya.

Penerapan *whistleblowing system*

Penerapan *whistle blowing system* (WBS) di lingkungan Bank merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dan bermanfaat sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya *fraud* dalam praktik bisnis Bank. Bank BTPN telah menjalankan kebijakan ini sejak lama dan akan melakukan segala usaha untuk senantiasa melakukan perbaikan.

Penerapan WBS ini sejalan dengan nasihat yang senantiasa disampaikan kepada manajemen agar selalu menerapkan prinsip kepatuhan dalam praktik bisnis. Kehadiran WBS menjadi saluran yang sangat mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

WBS bukan sekadar saluran pelaporan kasus, tetapi juga merupakan sarana untuk mengingatkan manajemen bahwa mereka harus menerapkan pengelolaan perusahaan, dengan prinsip-prinsip kepatuhan yang benar. WBS juga merupakan alat ukur bagaimana keberhasilan manajemen dalam mengoperasikan Bank dimana dengan rendahnya jumlah kasus yang dilaporkan dapat berarti bahwa Bank telah dikelola dengan baik.

Mekanisme WBS telah ditingkatkan baik dalam hal kegiatan pengawasan oleh Dewan Komisaris, penanganan keluhan serta perbaikan alur pelaporan yang melibatkan Komite Pemantau Risiko.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) termasuk bagian penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas.

Di lingkungan organisasi Bank BTPN, pelaksanaan CSR dilakukan, melalui satu unit bisnis khusus, yaitu Daya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen manajemen dalam mengimplementasikan CSR, sekaligus merupakan kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan antara bisnis dengan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.

Program yang dijalankan oleh Daya merupakan antara usaha Bank, misi sosial dan corporate shared value. Sejak penggabungan, program Daya yang awalnya memiliki tiga pilar, berubah menjadi empat pilar agar lebih relevan dengan posisi Bank yang telah berubah menjadi bank universal.

Empat pilar dimaksud berkaitan dengan: pengembangan kompetensi nasabah, pengelolaan keuangan, kehidupan yang berkesinambungan, serta kapasitas untuk tumbuh.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pilar-pilar tersebut merupakan pondasi penting yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sepanjang 2019, kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh manajemen, yang antara lain ditunjukkan melalui jutaan usaha kecil dan menengah yang dibantu melalui program Daya tersebut.



Program yang dijalankan oleh Daya merupakan integrasi antara misi bisnis dengan misi sosial Bank BTPN atau corporate share value.



Pola hubungan antara pengelola Daya dengan masyarakat dan nasabah juga sangat dekat, dan bahkan cenderung bersifat berkesinambungan. Bentuk kegiatannya, tidak hanya dibidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, tetapi juga di bidang kesehatan.

Model pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial yang berkesinambungan ini, menurut kami sangat bagus untuk terus dikembangkan. Dewan Komisaris berharap agar daya jangkauannya ke depan akan semakin luas.

Perubahan Komposisi Direksi Dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini adalah sesuai dengan Rancangan Penggabungan Usaha yang mulai berlaku efektif menjabat sejak tanggal 1 Februari 2019, dan diangkat kembali dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 15 Februari 2019. Melalui RUPS Luar Biasa pada bulan September 2019, telah disetujui pengangkatan Hanna Tantani sebagai Direktur Keuangan untuk memperkuat jajaran Direksi Bank BTPN, dan Irwan Mahjudin Habsjah sebagai Komisaris Independen, menggantikan Tony Prasetyantono, yang meninggal dunia pada bulan Januari 2019 sebelum penggabungan usaha berlaku efektif.

Tantangan Atas Prospek Usaha 2020

Pada saat Laporan Tahunan ini dibuat, sedang terjadi penyebaran virus COVID19 di seluruh pelosok dunia. Dewan Komisaris berpandangan bahwa selain faktor perlambatan ekonomi secara global, faktor pandemi ini akan membawa pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan tahun 2020, yang sementara waktu telah terlihat dari penurunan Index Harga Saham Gabungan (IHSG) serta peningkatan nilai tukar mata uang dolar terhadap Rupiah.

Tantangan lain yang dihadapi Bank BTPN adalah datang dari pesaing dalam segmen usaha yang mulai mengalami perlambatan dan juga sebaliknya dari segmen yang tengah menjadi primadona saat ini, yaitu digital banking. Tantangan tak hanya datang dari bank namun juga dari perusahaan-perusahaan *financial technology (fintech)* yang dianggap lebih memiliki kemudahan dibandingkan dengan bank yang *highly regulated*.

Kami percaya bahwa peningkatan komitmen Bank terhadap pelaksanaan GCG serta kepatuhan untuk mencapai zero penalties adalah strategi-strategi utama untuk menjamin bahwa Bank BTPN tetap mendapatkan kepercayaan dalam bisnis perbankan.

Terkait dengan hal itu, Dewan Komisaris percaya bahwa pertimbangan dalam menyusun prospek usaha yang dibuat oleh Direksi sudah sesuai. Manajemen juga telah mempertimbangkan kondisi eksternal sebagai suatu faktor yang penting dalam menyusun rencana usaha Bank ke depan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga melihat bahwa manajemen telah menyeimbangkan antara prospek bertumbuh dengan potensi risiko yang dihadapi. Karenanya Dewan Komisaris tetap mengingatkan kepada Direksi untuk konsisten dalam menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam upaya mencapai target.

Apresiasi

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan usaha Bank BTPN hingga pada 2019. Begitu pun dengan arahan dan bimbingan yang telah disampaikan oleh pemegang saham.

Kepada seluruh anggota Direksi, pihak independen komite beserta seluruh karyawan Bank BTPN, Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya yang telah dilakukan dan prestasi yang diperoleh di 2019. Terutama, atas pencapaian kinerja usaha yang baik di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi.

Kepada para pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris turut mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang diberikan selama ini. Dengan dukungan para pemangku kepentingan pula, manajemen mampu menyajikan kinerja usaha yang baik untuk Tahun Buku 2019.



Mari Elka Pangestu
Komisaris Utama